**BAB IV**

**ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

**4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisis Gambaran Umum selama 5 tahun, maka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. **Kemiskinan**

Salah satu indikator utama dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan. Pada saat ini jumlah penduduk miskin Kabupaten Purbalingga sebesar 176.040 atau 19,75 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah tersebut, sebagian menempati rumah yang tidak layak huni. Data tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga sebanyak 27.533 rumah, dan 3.526 (12,8 persen) diantaranya menyatu dengan kandang ternak, serta 13.894 (37,3 persen) diantaranya tidak memiliki jamban yang layak. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan, yaitu sebesar 87,90.

1. **Pendidikan**

Kinerja pembangunan pendidikan menjadi salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Indikator kinerja utama pembangunan pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan data tahun 2015, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga sebesar 11,78 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 6,85 tahun. Berdasarkan strata pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik yaitu sebesar 109 sedangkan APK SMP/Sederajat sebesar 100, dan APK Sekolah Menengah/Sederajat baru sebesar 52,47. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga, maka pembangunan pendidikan harus terus ditingkatkan. Dengan meningkatnya kualitas manusia antara lain melalui peningkatan pendidikan dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan dan daya saing setiap individu dalam mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi. Oleh karena itu dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dalam jangka panjang akan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Meskipun layanan pendidikan di Kabupaten Purbalingga sudah menjangkau seluruh wilayah, tetapi masih dibutuhkan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik dari sisi kapasitas maupun kualitasnya antara lain berupa ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru, kamar mandi dan WC, meubelair, alat peraga dan sebagainya. Pada tahun 2015 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar dalam kondisi baik sebanyak 3.033 ruang, dalam kondisi rusak ringan sebanyak 311 ruang, dalam kondisi rusak sedang 67 ruang, dan dalam kondisi rusak berat sebanyak 32 ruang. Sedangkan untuk SMP masih terdapat 14 ruang dalam kondisi rusak berat, 6 ruang dalam kondisi rusak sedang, 74 ruang dalam kondisi rusak ringan dan 1.067 ruang dalam kondisi baik. Dalam penyediaan fasilitas perpustakaan, pada saat ini masih terdapat 180 SD, 73 MI, dan 10 SMP, serta 30 MTs yang belum memiliki ruang perpustakaan. Sementara itu dalam penyediaan ruang laboratorium IPA, 59 SMP dan 8 MTs yang memiliki ruang laboratorium. Demikian juga dalam penyediaan prasarana lainnya masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas kamar mandi dan WC yang layak dan terpisah antara kamar mandi/WC murid dan kamar mandi/WC guru. Dalam hal ketersediaan tenaga pendidik juga masih perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Pada tahun 2015, guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4 baru mencapai 74,65 persen, guru SMP/MTs baru 35,82 persen, sedangkan guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D4 baru mencapai 28,32 persen.

Permasalahan penting lainnya dalam pembangunan bidang pendidikan adalah terkait pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi keluarga miskin. Pada saat ini masih terdapat 1.159 orang anak usia sekolah SD dan 2.167 orang anak usia sekolah SMP yang tidak sekolah dimana sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi (hasil pendataan oleh TKSK Tahun 2015). Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak sekolah merupakan penderita cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan kebijakan afirmatif agar anak-anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak sekolah dapat menikmati layanan pendidikan termasuk layanan pendidikan luar biasa.

1. **Kesehatan**

Pembangunan bidang kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas manusia. Kinerja pembangunan kesehatan menjadi penentu utama Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator utama untuk menilai kinerja pembangunan manusia. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 67.02 dan menduduki peringkat ke 26 di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu komponen IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup masyarakat Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 72,80 tahun. Relatif rendahnya UHH Kabupaten Purbalingga antara lain karena beberapa indikator kinerja pembangunan kesehatan masih relatif rendah. Angka morbiditas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 16,5 persen, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar 132 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan Angka Kematian Bayi sebesar 10,12 per 1000 KH.

Kinerja pembangunan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2015, dari 22 Puskesmas yang ada, belum ada Puskesmas yang terakreditasi. Sedangkan jumlah rumah sakit yang terakreditasi juga belum ada. Sementara itu jumlah Puskesmas yang melakukan layanan rawat inap Puskesmas baru sebanyak 11 puskesmas, dan jumolah Puskesmas mampu bersalin sebanyak 12 unit. Terkait dengan layanan pesalinan, cakupan Puskesmas mampu PONED sesuai standar baru mencapai 5 unit dan cakupan rumah sakit mampu PONEK sesuai standar baru mencapai 1 unit.

Akses sanitasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 cakupan akses air bersih di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 72,4 persen, sedangkan cakupan kepemilikan jamban baru mencapai 74,1 persen. Relatif rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi serta masih adanya budaya buang air besar di tempat terbuka memerlukan upaya sungguh-sungguh dalam rangka peningkatan akses sanitasi masyarakat. Cakupan desa Open Defecation Free (ODF) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 baru mencapai 11 desa (4,6 persen).

Adanya prevalensi HIV-AIDS di tingkat nasional dan khususnya di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi merupakan permasalahan yang harus segera ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena HIV – AIDS merupakan *silent killer*, pembunuh tersembunyi yang pelan tapi pasti. Tren jumlah penderita HIV-AIDS terus meningkat dengan penderita usia produktif, reproduktif, dan bayi. Hal ini berdampak sangat luas baik berupa dampak medis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya/ agama. Dikhawatirkan adanya fenomena gunung es pada kasus HIV-AIDS karena terdapat orang berperilaku resiko tinggi antara lain wanita/ pria pekerja seks, pelanggan pekerja seks, pasangan pelanggan pekerja seks, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, LSL, waria, narapidana, dan anak jalanan. Diperlukan upaya maksimal guna mengendalikan epidemi HIV-AIDS, di samping juga perlu penanganan secara profesional pada orang yang telah terjangkit HIV-AIDS serta tersedianya antiretroviral (ARV).

1. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Meskipun kondisi prasarana jalan di Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan, tetapi masih perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan termasuk pembangunan jalan dan jembatan baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi antar wilayah. Pada tahun 2015 kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga dalam kondisi baik sebesar 72,55 persen, Sedangkan jembatan dalam kondisi baik sebesar 93,36 persen.

Kondisi prasarana irigasi juga masih perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi. Pada tahun 2015 sawah beririgasi teknis di Kabupaten Purbalingga seluas 5.962 ha, setengah teknis seluas 6.029 ha, dan sawah tadah hujan seluas 2.407 ha.

Sementara itu untuk mewujudkan ketertiban pengelolaan tata bangunan gedung dan keamanan pemanfaatan gedung, diperlukan adanya produk hukum terkait penataan bangunan dan lingkungan serta peningkatan pelaksanaan sertifikasi laik fungsi gedung.

1. **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perlu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana permukiman. Pada tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga masih terdapat kawasan kumuh taraf ringan seluas 30,17 ha, dan kawasan kumuh taraf sedang seluas 2,22 ha. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih. Cakupan jamban masyarakat di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 71,4 persen, sedangkan cakupan akses air bersih baru mencapai 72,4 persen. Penanganan persampahan di Kabupaten Purbalingga juga belum optimal, dengan rasio sampah yang ditangani baru sebesar 10 persen. Terkait pemenuhan kebutuhan listrik, pada saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum menikmati fasilitas listrik, dengan rasio elektrifikasi sebesar 81 persen.

1. **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam Pemilu masih dibawah 80 persen. Meskipun masih relatif lebih tinggi dibanding daerah lain, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan akhir pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia mengharuskan adanya keseimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang meliputi keseimbangan antara pembangunan prasarana fisik dengan pembangunan manusia serta antara pemenuhan kebutuhan fisik manusia dengan pemenuhan kebutuhan moral spiritual termasuk pembangunan karakter dan pengembangan wawasan kebangsaan. Pada saat ini semakin nampak adanya fenomena sosial dimana masyarakat semakin permisif terhadap perilaku yang menyimpang dari norma dan etika sosial maupun keagamaan. Di sisi lain juga semakin dirasakan adanya penurunan kesetiakawanan sosial serta semangat patriotisme dan nasionalisme yang ditandai dengan menurunnya semangat gotong royong serta menurunnya kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

1. **Sosial**

Sesuai dengan landasan ideal dan konstitusional, pembangunan yang dilaksanakan harus melibatkan dan memberi manfaat secara merata bagi seluruh rakyat baik dalam perspektif kewilayahan maupun dalam perspektif strata sosial ekonomi masyarakat agar seluruh rakyat dapat ditingkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya secara layak dan bermartabat. Realita yang ada menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial maupun ekonomi dengan berbagai sebab yang menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. Terhadap kelompok masyarakat seperti ini yang lazim disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu dilakukan kebijakan intervensi yang bersifat afirmatif.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah dan persentase PMKS yang terlayani, dalam hal ini PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Demikian juga jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya masih sangat terbatas. Sesuai target SPM, jumlah PMKS yang harus ditangani pada tahun 2015 sebesar 80%.

1. **Tenaga kerja**

Meskipun lebih rendah dari angka pengangguran Provinsi Jawa Tengah, upaya untuk mengurangi angka pengangguran perlu terus dilakukan antara lain melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja. Disisi lain Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi buruh melalui upaya pemenuhan hak-hak normatif buruh. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 5,13 persen. Terkait pemenuhan hak normatif buruh, pada saat ini cakupan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga yang mendapat perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebesar 70 persen. Sedangkan rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2016 sebesar Rp. 1.377.500,- atau 103,55 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2016.

1. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

Dalam rangka pembangunan yang berkeadilan, perlu terus ditingkatkan upaya pengarusutamaan gender dan adanya kebijakan khusus terkait pemenuhan hak-hak anak. Indikator keberhasilan pengarusutamaan gender antara lain adalah Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2014, IPG Kabupaten Purbalingga sebesar 90,12 (menempati urutan ke 24 di Provinsi Jawa Tengah). Sedangkan IDG Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebesar 71,03 (menempati urutan ke 11 di Provinsi Jawa Tengah). Isu gender dan anak selama ini harus diakui masih kurang memperoleh perhatian. Anak-anak sebagai generasi penerus dan pewaris masa depan merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan oleh karena itu harus ada kebijakan dan program yang nyata dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Masih adanya pekerja di bawah umur dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah masyarakat yang sebagian besar diantaranya tidak diketahui (tidak dilaporkan) mengharuskan adanya peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah pekerja dibawah umur (5 – 14 tahun) di Kabupaten Purbalingga sebanyak 533 orang dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 16 kasus.

1. **Pertanahan**

Pembangunan fasilitas umum yang semakin pesat membutuhkan ketersediaan lahan yang memadai. Adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan lahan bagi pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dsb. Namun tidak semua kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sudah tersedia lahannya. Pada beberapa kasus bangunan fisik sudah selesai namun lahannya belum selesai dibebaskan. Hal tersebut seringkali menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki aset tanah yang cukup banyak dan jumlahnya menyebar, tapi belum semua aset tersebut terpetakan sehingga belum semua Tanah Milik Pemerintah Kabupaten bersertifikat.

1. **Lingkungan Hidup**

Pembangunan lingkungan hidup sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi lingkungan hidup yang terjaga dan lestari akan mampu mendukung kehidupan manusia pada saat ini dan yang akan datang. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka terjadi ancaman degradasi lahan khususnya lahan pertanian. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian tak terelakan. Lahan pertanian basah maupun kering berupa kebun hortikultura ataupun tegalan selain berfungsi menopang ketahanan pangan juga menjadi komponen ekosistem dan komponen daur hidrologi, sehingga apabila tidak ada pengendalian penggunaan lahan baik untuk permukiman maupun industri akan mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem dan daur hidrologi. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD), pada tahun 2015 terjadi pengurangan tanah kering/tegalan sebanyak 8.367 ha, dan pengurangan sawah sebanyak 1.385,81 ha. Sedangkan lahan permukiman bertambah 7.748 ha (67 persen).

1. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan akan sangat mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tingkat kemajuan desa mencerminkan efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 0,6394.

1. **Pengendalian Penduduk dan KB**

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 masih cukup tinggi yaitu sebesar 1,06 persen. Hal ini tentu membutuhkan upaya sungguh-sungguh dalam rangka peningkatan kepesertaan KB. Cakupan kepesertaan KB aktif di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 76,22 persen, sedangkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (unmetneed KB) sebesar 12,5 persen, dan angka *drop out* KB sebesar 30 persen. Di sisi lain tingkat kesejahteraan keluarga masih perlu untuk terus ditingkatkan dimana jumlah keluarga sejahtera baru mencapai 55,01 persen dan jumlah keluarga pra sejahtera masih sebesar 24,9 persen.

1. **Perhubungan**

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis.

Terminal menjadi salah satu sarana perhubungan yang cukup penting. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35/2003). Jumlah terminal yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2015 sebanyak 6 terminal dari kebutuhan sebanyak 10 terminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan terminal angkutan penumpang belum dapat memenuhi kebutuhan terminal. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis.

1. **Komunikasi dan Informatika**

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2015 jumlah SKPD yang memiliki website baru mencapai 25 SKPD dengan intensitas updating informasi rata-rata sebanyak 320 hari per tahun. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebesar 26 unit. Sedangkan jumlah pelayanan publik perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara online baru 1 unit.

1. **Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat akan meningkatkan kemampuannya dalam mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraannya. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga relatif tinggi dibanding daerah lain, tetapi pendapatan perkapita masyarakat Purbalingga masih relatif rendah. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta. Hal ini antara lain disebabkan karena belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi yang ada.

Kondisi agro ekologis wilayah Kabupaten Purbalingga yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai komoditas pertanian masih perlu untuk ditingkatkan pendayagunaannya antara lain melalui pengembangan komoditas pertanian yang bernilai tinggi sehingga akan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pengembangan kepariwisataan juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan termasuk pengembangan desa wisata yang dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat karena memiliki efek multiplier yang luas.

Secara umum masih perlu peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat yang meliputi sektor pertanian dalam arti luas, industri rakyat, dan sebagainya. Di sektor perdagangan, perlu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perdagangan terutama melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional. Di sektor koperasi masih perlu pengembangan kehidupan berkoperasi dan peningkatan kualitas manajemen koperasi. Sementara itu untuk mendorong investasi di Kabupaten Purbalingga perlu peningkatan iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan angka pengangguran semakin berkurang.

1. **Kepemudaan dan Olahraga**

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotisme, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda. Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam tahun 2015, fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) kejuaraan dan di tingkat nasional sebanyak 1 (satu) kejuaraan.

Salah satu tantangan dalam upaya pembangunan manusia khususnya dalam pembangunan kepemudaan adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu peningkatan sosialisasi bahaya narkoba khususnya di kalangan generasi muda.

1. **Kebudayaan**

Pembangunan bidang seni budaya merupakan salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Seni budaya, khususnya seni budaya nasional merupakan wahana internalisasi nilai-nilai luhur yang perlu untuk terus ditanamkan dan dikembangkan untuk memperkokoh karakter dan integritas bangsa. Disamping itu, seni budaya secara umum dapat menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Di tengah kehidupan yang semakin materialistis dan semakin menguatnya gelombang globalisasi, ada kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya bangsa. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dan program yang nyata dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional. intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian yang ada perlu terus ditingkatkan. Demikian juga berbagai kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

1. **Perpustakaan**

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikembangkan semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca. Peran perpustakaan sangat penting dalam rangka mendorong dan mendukung pengembangan budaya membaca. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada saat ini sebanyak 312 unit yang terdiri dari 2 unit perpustakaan umum, 255 unit perpustakaan sekolah, 48 unit perpustakaan desa, dan 5 unit perpustakaan lainnya.

**4.2. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu Strategis didentifikasi dari berbagai sumber, meliputi : 1) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga 2) Isu strategis daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga 3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan berupa RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, dan isu strategis dengan melihat kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, sarana prasarana dan pemerintahan umum pada masa kini serta melihat kemungkinan yang akan terjadi masa mendatang.

Selain itu Isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yang meliputi : 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Isu Strategis yang diangkat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 meliputi :

1. **Kemiskinan**

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/daerah. Keluarga yang miskin hampir dapat dipastikan sulit untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas karena rendahnya kemampuan untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup antara lain ditandai dengan kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, papan (termasuk sanitasi), sandang (dalam batas yang memadai), akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta kesempatan untuk mengaktualisasikan pikiran, gagasan, aspirasi dan sebagainya. Oleh karena itu kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis sehingga harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan agar dapat dicapai tujuan pembangunan dan tujuan penyelenggaraan negara sesuai amanat konstitusi.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi kompleks. Dilihat dari aspek penyebab, terjadinya kemiskinan dapat disebabkan karena faktor-faktor internal maupun eksternal. Penyebab yang bersifat internal antara lain : 1) keterbatasan kondisi fisik seperti kecacatan (termasuk kecacatan mental); 2) terbatasnya kapasitas dan kompetensi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya; 3) keterbatasan kepemilikan aset yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi. Berdasarkan penyebab yang bersifat eksternal, kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : 1) kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya kebijakan yang tidak *pro poor* ; 2) kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya budaya yang tidak produktif; 3) kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kondisi lingkungan alam yang kurang menunjang kehidupan masyarakat seperti tanah yang tandus, rawan bencana dan sebagainya.

Kompleksitas permasalahan kemiskinan menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Artinya upaya penanggulangan kemiskinan harus mampu menyentuh akar penyebabnya tidak hanya menangani gejala yang nampak, harus mencakup seluruh strata keluarga miskin dengan sasaran yang jelas dengan melibatkan seluruh sektor terkait dan dilaksanakan secara terus-menerus. Berdasarkan kondisinya, keluarga miskin dikelompokan menjadi 4 (empat) klaster. Klaster 1 yaitu keluarga miskin yang tidak memiliki potensi untuk diberdayakan agar mampu melakukan aktivitas produktif seperti misalnya orang lanjut usia yang tidak memiliki pengampu, anak terlantar, penyandang cacat ganda, dan sebagainya. Untuk keluarga miskin klaster 1, satu-satunya intervensi yang harus diberikan oleh pemerintah adalah upaya yang bersifat karitatif yaitu dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan bermartabat termasuk di dalamnya memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Keluarga miskin klaster 2 adalah keluarga miskin yang masih memungkinkan untuk diberdayakan meskipun dalam skala yang terbatas. Termasuk dalam klaster 2 adalah keluarga miskin dalam usia produktif yang sehat secara jasmani dan mental meskipun tidak memiliki aset produktif atau memiliki dalam skala yang sangat terbatas. Intervensi pemerintah yang dapat diberikan kepada keluarga miskin klaster 2 adalah berupa upaya pemberdayaan yang dilakukan bersamaan dengan upaya karitatif yaitu pemberian bantuan/stimulan bagi pemenuhan kebutuhan hidup pokok, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan sebagainya. Keluarga miskin klaster 3 adalah keluarga miskin yang memiliki aktivitas produktif meskipun dalam skala mikro sehingga masih memungkinkan untuk dientaskan. Di samping pemberian bantuan stimulan untuk mengurangi beban pengeluarannya, upaya pengentasan keluarga miskin klaster 3 dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan usaha, fasilitasi permodalan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha, dan sebagainya. Adapun klaster 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang membutuhkan dukungan dan fasilitasi pemerintah melalui berbagai program pembangunan agar tidak jatuh miskin terutama ketika terjadi gejolak ekonomi yang menimbulkan kenaikan harga kebutuhan hidup pokok.

Di samping intervensi dalam rangka pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin, yang paling bersifat strategis adalah upaya pencegahan pewarisan kemiskinan dari keluarga miskin kepada anak keturunannya untuk memutus rantai kemiskinan. Agar tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya, anak-anak keluarga miskin harus tercukupi kebutuhan hidupnya secara memadai berupa pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan anak-anak keluarga miskin dapat mengalami tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta cukup memiliki bekal ilmu dan keterampilan sehingga memiliki daya saing untuk memperoleh lapangan pekerjaan atau berusaha secara mandiri.

Berdasarkan data Susenas BPS, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 19,75 persen. Sedangkan pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58 persen. Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah. Relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menyebabkan relatif rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

1. **Pembangunan Manusia**

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi, sosial dan sebagainya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat.

Pembangunan manusia juga menjadi isu strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak dasar ini antara lain meliputi hak untuk mendapatkan identitas/ legalitas, akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, pangan, perumahan sehat dan layak, serta fasilitas sanitasi dan akses terhadap air minum. Pembangunan manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya terkait pembangunan manusia di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran Rill per Kapita. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebesar 66.23 dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 67.02. Meskipun mengalami kenaikan, namun masih di bawah rata – rata capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 68.78 pada tahun 2014 dan 69.49 pada tahun 2015. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2014 menempati urutan ke-26 se Jawa Tengah, sedangkan capaian IPM tahun 2015 menempati urutan yang ke-27 se Jawa Tengah.

 Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Variabel pertama adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Oleh karena itu AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan lama hidup dan hidup sehat. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya peningkatan taraf kesehatan. Angka Harapan Hidup tinggi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan melalui pemeliharaan kesehatan. Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Capaian AHH Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 72.80 dan capaian pada tahun 2015 tetap, tidak mengalami kenaikan. Capaian AHH ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 73.88 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 73.98 pada tahun 2015. Capaian AHH Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi posisi ke - 29 / 30 se-Jawa Tengah dan pada tahun 2015 berada pada urutan 30.

Indikator bidang pendidikan yang pertama adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsinya dalah bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pembangunan pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Pada tahun 2014 capaian HLS Kabupaten Purbalingga sebesar 11.51 dan meningkat menjadi 11.78 pada tahun 2015. Capaian HLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12.17 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 12.78 pada tahun 2015. Capaian HLS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke – 28 se Jawa Tengah, sedangkan capaian tahun 2015 menempati urutan ke – 31.

Indikator pembangunan pendidikan selanjutnya adalah Rata – rata Lama Sekolah (RLS). RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi penduduk pada usia 25tahun ke atas, baru selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun lama sekolah. Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun, SD sedrajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 9 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, D4/S1 sederajat 16 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun. Adapun capaian RLS Kabupaten Purbalingga sebesar 6.84 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 6.85 pada tahun 2015. Capaian RLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 6.93 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 7.03 pada tahun 2015. Capaian RLS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke – 19 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada urutan ke – 21.

Sementara itu, kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purcashing* *Power* *Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga sebesar 8.539 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 8.838 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9.640 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 9.930 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke 27 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada peringkat ke 25.

Salah satu agenda pembangunan yang telah disepakati secara global yang dapat menjadi referensi dan menjadi dasar dalam perumusan isu strategis adalah komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada United Nation Summit tahun 1990 oleh PBB. MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan dan kemitraan global. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam satu sasaran atau lebih dengan indikator yang terukur yaitu terkait pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. MDGs yang didasarkan pada konsensus dan kemitraan global ini, juga menekankan kewajiban negara maju untuk mendukung penuh upaya tersebut. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG’s oleh Indonesia, merupakan keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDG’s sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah.

Pencapaian tujuan dalam MDGs telah berakhir pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs).* Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 – MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deflation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, *food and energy security,* dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

*Sustainabale Development Goals* (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGslebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO). Penyusunan SDGssendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGsjuga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal dan dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Adapun 17 *global goals* dari SDGs adalah sebagai berikut :

1. **Tanpa Kemiskinan**

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

1. **Tanpa Kelaparan**

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

1. **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan**

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

1. **Pendidikan Berkualitas**

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

1. **Kesetaraan Gender**

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

1. **Air Bersih dan Sanitasi**

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

1. **Energi Bersih dan Terjangkau**

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

1. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak**

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

1. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

1. **Mengurangi Kesenjangan**

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

1. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas**

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.

1. **Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab**

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

1. **Aksi Terhadap Iklim**

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

1. **Kehidupan Bawah Laut**

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

1. **Kehidupan di Darat**

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

1. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian**

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

1. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Mengingat bahwa pembangunan manusia mencakup begitu banyak aspek dan menjadi komitmen global, maka pembangunan manusia ditetapkan sebagai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Pembangunan manusia sangat berkaitan erat dengan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, dan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam rangka memperkokoh karakter dan jati diri bangsa. Berdasarkan data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, diketahui bahwa jumlah anak usia sekolah setingkat SD sampai dengan SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu (tingkat kesejahteraan 40 persen terrendah) di Kabupaten Purbalingga sebanyak 87.492 anak. Dari jumlah tersebut terdapat 1.970 anak usia sekolah setingkat SD (usia 7 – 12 tahun) yang tidak sekolah (4.46 persen), dan 5.450 anak usia sekolah setingkat SMP (usia 13 – 15 tahun) yang tidak sekolah (22,75 persen). Sedangkan pada usia sekolah SM (usia 16 – 18 tahun) yang tidak sekolah sebanyak 13.265 anak (68.45 persen). Tetapi berdasarkan hasil pendataan inisiatif pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), jumlah anak usia sekolah SD yang tidak sekolah sebanyak 1.159 anak, dan anak usia sekolah SMP yang tidak sekolah sebanyak 2.167 anak. Berbagai hal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan pendidikan antara lain memperluas dan pemerataan akses pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terutama bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, proses pendidikan harus menjadi sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang melalui internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan.

Dalam pembangunan kesehatan, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu, perlu untuk terus ditingkatkan upaya pemenuhan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan serta pemberian fasilitas layanan jaminan kesehatan untuk seluruh warga masyarakat terutama bagi warga miskin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Disamping capaian AHH yang masih rendah, berdasarkan hasil PBDT 2015 masih terdapat 16.150 orang yang menderita penyakit kronis. Selanjutnya, dari 98.371 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah hasil PBDT 2015, masih terdapat 34.245 rumah tangga atau 34.81 persen yang tidak memiliki akses jamban baik jamban sendiri maupun jamban bersama.

Selanjutnya dalam rangka memperkukuh karakter dan jatidiri warga masyarakat perlu adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menangkal penetrasi budaya global yang kurang konstruktif serta meningkatkan apresiasi terhadap bahasa nasional dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

1. **Ekonomi Kerakyatan**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta

Dalam struktur PDRB Kabupaten Purbalingga, Sektor Pertanian masih memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 30,00 persen disusul Sektor Industri Pengolahan (23,50 persen), serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,21 persen). Meskipun angka PDRB per kapita relatif kecil tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun cukup baik yaitu rata-rata 5,7 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan Sektor Pertanian cenderung mengalami penurunan (lebih rendah dibanding pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Jasa). Menurunnya pertumbuhan Sektor Pertanian adalah wajar dan menunjukkan dinamika perekonomian yang positif. Dengan terbatasnya ketersediaan lahan pertanian, maka meskipun terus dilakukan upaya peningkatan produktivitas melalui intensifikasi pertanian, pada saatnya akan sampai pada titik maksimal sehingga produktivitasnya sulit untuk ditingkatkan lagi. Di sisi lain sektor sekunder dan tersier terus bertumbuh dengan lebih cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan produk-produk manukfaktur dan jasa.

Meskipun pertumbuhan ekonomi perlu untuk terus lebih didorong tetapi apabila tidak diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan maka tidak banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan. Pada tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga sebesar 5,13 persen, lebih rendah dibanding TPT tahun 2013, yaitu sebesar 5,72 persen. Tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan angka Indeks Gini sebesar 0,32.

Salah satu aktivitas ekonomi yang dipandang memberi efek *multiplier* yang luas dan dapat menjadi *prime mover* perekonomian daerah adalah pariwisata. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

1. **Infrastruktur**

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana irigasi, prasarana perkotaan, prasarana permukiman, serta prasarana pelayanan sosial dan ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan untuk kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai akan menyebabkan terhambatnya angkutan barang dan orang sehingga akan menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan saat ini, meskipun seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dapat diakses melalui angkutan kendaraan bermotor roda empat, tetapi masih perlu peningkatan kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke beberapa wilayah tertentu. Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi transportasi, juga perlu dilakukan pembangunan beberapa jalan dan jembatan baru untuk menghubungkan beberapa wilayah tertentu agar diperoleh jarak tempuh yang lebih pendek. Untuk meningkatkan umur ekonomi jalan juga diperlukan pembuatan saluran drainase dan talud pengaman jalan pada titik-titik tertentu di seluruh wilayah.

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik-turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era globalisasi di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu transportasi udara. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan terus berupaya dan berpartisipasi aktif untuk melakukan koordinasi dan memberikan dukungan bersama-sama dengan daerah lain di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Udara untuk terwujudnya pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasaba menjadi Bandar Udara.

Pembangunan serta peningkatan kapasitas dan kualitas bendung dan saluran irigasi juga masih perlu untuk dilaksanakan guna meningkatkan kelancaran penyediaan air bagi kepentingan budidaya pertanian dalam arti luas. Ketersediaan air sangat vital bagi budidaya pertanian sehingga produksi pertanian tidak mungkin dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan apabila tidak tersedia jaringan irigasi yang mampu mengalirkan air pada seluruh lahan pertanian.

Sementara itu, untuk meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan serta meningkatkan kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat di perkotaan diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perkotaan serta penataan kawasan perkotaan. Dengan terwujudnya kawasan perkotaan yang tertib, indah, nyaman, dan aman, dengan sendirinya juga akan menciptakan daya tarik wilayah bagi kunjungan pariwisata maupun peningkatan daya tarik investasi.

Pengelolaan persampahan merupakan permasalahan penting yang selama ini belum mampu ditangani secara optimal. Saat ini pelayanan persampahan baru mencapai 10 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Jumlah potensi timbulan sampah jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk mencapai 1.942,6 m3 per hari atau 58.278 m3 per bulan atau melebihi volume candi Borobudur (55.000 m3). Besarnya timbulan sampah yang tidak tertangani di samping akan mengganggu keindahan dan kenyamanan juga akan memberi dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, udara serta gangguan kesehatan dan estetika. Keterbatasan kapasitas penanganan sampah di samping karena keterbatasan kapasitas armada, tempat penampungan sementara dan jumlah tenaga kebersihan yang ada juga karena terbatasnya daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada pada saat ini. Berdasar hasil kajian, kapasitas sisa lahan TPA Banjaran pada tahun 2016 tinggal 31.855 m3, tahun 2017 tinggal 17.422 m3, dan tahun 2018 sampai bulan Pebruari tinggal 2.989 m3, sehingga pada tahun 2018 harus dipindah ke lokasi lain atau dilakukan treatment khusus untuk meningkatkan kapasitas dan/atau merubah manajemen pengelolaan sampah sehingga umur ekonomi TPA dapat diperpanjang. Pemindahan TPA ke lokasi lain dihadapkan pada kesulitan menentukan lokasi baru yang memenuhi syarat teknis serta adanya kendala akses angkutan sampah (jarak tempuh dan kapasitas jalan yang akan dilalui) dan efisiensi dalam operasionalisasinya. Di samping itu, pemindahan TPA juga harus memperhatikan aspek sosiologis, ekologis dan ekonomis agar permasalahan yang terjadi pada TPA yang lama tidak terulang kembali. Hal lain yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan adalah terkait sistem pengelolaan dan kelembagaan pengelola. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk TPA, perlu implementasi konsep 3 R (reuse, reduce, recycle) mulai dari hulu (tingkat rumah tangga), tingkat kelompok masyarakat, sampai dengan pengelolaan akhir di TPA. Selama ini pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem open dumping yang kemudian pada beberapa tahun terakhir dilaksanakan dengan sistem *controlled landfill* (dan itupun belum dilaksanakan secara konsisten). Kelembagaan pengelolaan sampah yang selama ini dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Apabila permasalahan persampahan tidak segera ditangani secara sistematis, maka dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan yang sangat besar dan semakin sulit untuk dicarikan solusi pemecahannya.

1. **Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Beragama**

Salah satu permasalahan penting pembangunan pada saat ini adalah adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kebanggaan terhadap jatidiri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur akibat cepatnya penyerapan budaya global, sementara nilai-nilai positif budaya bangsa yang lebih relevan bagi pembangunan karakter bangsa justru diabaikan. Berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme dan hedonisme menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat patriotisme. Berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme juga menyebabkan berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, inovasi, dan pencapaian prestasi yang pada tahap berikutnya berdampak terhadap meningkatnya tindak kekerasan, premanisme dan kriminalitas. Kesemarakan kehidupan beragama yang nampak pada saat ini ternyata belum sejalan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama terbukti dengan banyaknya perilaku asusila, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, meningkatnya kriminalitas serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Disisi lain kecenderungan meningkatnya radikalisme dalam pemahaman agama juga menjadi ancaman tersendiri bagi tegaknya integritas nasional. Sementara itu kecenderungan berkembangnya sektarianisme agama dan fanatisme golongan yang berlebihan menjadi ancaman tersendiri bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu pengembangan wawasan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme perlu terus ditingkatkan pada saat ini dan yang akan datang. Demikian juga perlu dilakukan upaya pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang positif baik yang berpijak pada nilai agama maupun nilai budaya bangsa. Internalisasi nilai-nilai moral yang positif dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, non formal, informal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan beragama perlu terus didorong guna meningkatkan pengamalan dan penghayatan nilai–nilai agama bersamaan dengan upaya mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama.

1. **Lingkungan Hidup**

Eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia seperti pencemaran air dan udara, meningkatnya angka kesakitan penyakit degenartif, meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya populasi ikan di perairan umum, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa. Peningkatan pemanasan global dipicu meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari kegiatan manusia dalam menggunakan energi fosil, pengelolaan lahan dan pertanian, serta pengelolaan limbah. Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan intensitas hujan dan kemarau serta terjadi pergeseran musim. Dampak perubahan iklim berakibat terjadinya gagal panen pada sektor pertanian dan meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, angin ribut, dan kemarau berkepanjangan. Diperlukan upaya mengurangi perubahan iklim tersebut melalui aksi-aksi mitigasi (pengurangan) emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, peningkatan tutupan lahan, pertanian rendah emisi, dan pengelolaan limbah.

Sementara itu pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan semakin cepatnya penurunan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan populasi manusia bersamaan dengan peningkatan aktivitasnya serta peningkatan pemanfaatan bahan-bahan hasil sintesa kimiawi mengakibatkan meningkatnya dengan pesat produksi bahan pencemar lingkungan hidup (polutan) seperti sampah plastik, asap kendaraan bermotor, limbah kimia dan sebagainya. Di sisi lain peningkatan populasi penduduk menyebabkan peningkatan desakan terhadap sumberdaya lahan yang ditandai dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian maupun lahan yang memiliki fungsi lindung. Memburuknya kondisi hutan lindung dan kawasan lindung lainnya seperti kawasan tangkapan air, kawasan sekitar mata air, sempadan sungai, lahan dengan kelerengan tinggi telah mengakibatkan berbagai permasalahan dan ancaman bagi kehidupan manusia seperti mengeringnya beberapa mata air akibat menurunnya keseimbangan tata air, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir yang besar ketika musim penghujan dan kekeringan yang ekstrim ketika musim kemarau dan sebagainya.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang lebih cepat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan fungsi lingkungan hidup serta rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

1. **Tata kelola Pemerintahan**

Visi Pemerintah Daerah akan dapat dicapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip *good governance* antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis (*strategic vision*). Luasnya cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipikul pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus menghasilkan output secara optimal agar seluruh elemen organisasi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dengan mendayagunakan sumberdaya secara efisien. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu sesuai hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional, dengan mendapat skor dengan kategori sangat tinggi sehingga mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pada tahun 2015 nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga baru berada pada kategori CC (cukup baik) dengan skor 50,5.

Aktivitas seluruh elemen pemerintah daerah harus mengarah kepada visi yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Elemen organisasi dan struktur jabatan yang bersifat koordinatif harus berperan optimal dalam mengarahkan dan menggerakkan lini organisasi dalam rumpun koordinasinya agar masing-masing dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah daerah harus memahami visi daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap elemen organisasi pemerintah daerah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga secara efektif akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan maka pada gilirannya akan dapat diwujudkan visi pemerintah daerah.

Agar setiap elemen pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang secara efektif mampu mendukung terwujudnnya visi dan misi pemerintah daerah, harus didukung dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional. Profesionalitas aparatur pemerintah daerah mensyaratkan adanya integritas, kapasitas dan kompetensi. Oleh karena itu sistem karir aparatur harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan *meryt system*. Organisasi perangkat daerah harus disusun dengan struktur yang ramping tetapi mampu melaksanakan seluruh fungsi secara optimal dengan sistem tata kelola yang efektif.